

**ANALISIS REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH GUNA MENILAI KINERJA KEUANGAN
PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI**



POLITEKNIK NEGERI BALI

OLEH:

A A ISTRI DYAH CANDRIKA WIDYADNYANI

2015613073

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
BADUNG
2023**

**ANALISIS REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH GUNA MENILAI KINERJA KEUANGAN
PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI**



POLITEKNIK NEGERI BALI

OLEH:

A A ISTRI DYAH CANDRIKA WIDYADNYANI

2015613073

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
BADUNG
2023**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya mahasiswa Program Studi Diploma III Akuntansi bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A A Istri Dyah Candrika Widyadnyani

NIM : 2015613073

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir:

Judul : Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Guna Menilai Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Bangli

Pembimbing I : I Made Agus Putrayasa, SE, M. SA, Ak

Pembimbing II : Drs. I Made Sumartana., M.Hum

Tanggal Ujian : 14 Agustus 2023

Tugas Akhir yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dari perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badung, 14 Agustus 2023



(A A Istri Dyah Candrika Widyadnyani)

**ANALISIS REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH GUNA MENILAI KINERJA KEUANGAN
PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI**

A A Istri Dyah Candrika Widyadnyani

NIM. 2015613073

Tugas Akhir Ini Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma III
Pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali

Disetujui Program Studi Diploma III Akuntansi:

Pembimbing I

Pembimbing II


I Made Agus Putrayasa, SE, M. SA, Ak

NIP. 197808292008011007


Drs. I Made Sumartana., M.Hum

NIP. 196201091989031001

Disahkan Oleh:

Jurusan Akuntansi



I Made Sudana, SE., M.Si

NIP. 196112281990031001

**ANALISIS REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH GUNA MENILAI KINERJA KEUANGAN PADA
PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI**

Telah diuji dan dinyatakan lulus ujian pada:

14 Agustus 2023

PANITIA PENGUJI

KETUA:



I Made Agus Putrayasa, SE, M. SA, Ak

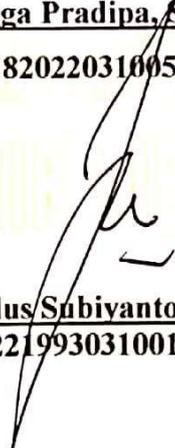
NIP. 197808292008011007

ANGGOTA:



Nyoman Angga Pradipa, S.E., M.Si., Ak., CA.

NIP. 199012182022031005



Dr. Drs. Paulus Subiyanto, M.Hum

NIP. 196106221993031001

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur dipanjatkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga Tugas Akhir yang berjudul **“Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Guna Menilai Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Bangli”** dapat disusun dan selesai dengan tepat waktu. Adapun tujuan dari disusunnya Tugas Akhir ini yaitu sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Pendidikan Diploma III pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.

Penyusunan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktunya memberikan bantuan, bimbingan, pengarahan, dorongan serta dukungan. Dalam kesempatan ini, disampaikan banyak terima kasih kepada:

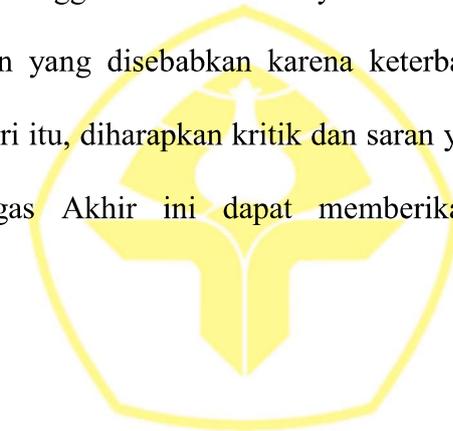
1. I Nyoman Abdi SE.,M.eCom selaku Direktur Politeknik Negeri Bali.
2. I Made Sudana, SE.,M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan arahan serta bimbingan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
3. I Made Bagiada, SE.,M.Si,Ak selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan arahan serta bimbingan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
4. Ni Made Wirasyanti Dwi Pratiwi, SE,M.Agb,Ak selaku Ketua Program Studi Diploma III Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan arahan serta bimbingan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

5. I Made Agus Putrayasa, SE, M. SA, Ak selaku Pembimbing I atas bimbingan, masukan, serta arahan selama penyusunan Tugas Akhir ini selesai.
6. Drs. I Made Sumartana., M.Hum selaku Pembimbing II atas bimbingan, masukan, serta arahan selama penyusunan Tugas Akhir ini selesai.
7. Drs. I Dewa Agung Bagus Riana Putra, M.si selaku Kepala Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bangli yang telah mengizinkan serta memberi kesempatan untuk melakukan penelitian Tugas Akhir.
8. Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bangli yang telah memberi izin, bantuan serta arahan dalam melaksanakan penelitian Tugas Akhir.
9. Pegawai Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bangli yang telah bersedia membantu dalam melaksanakan penelitian Tugas Akhir ini.
10. Ibu, Papah, Adisty, Dinda beserta seluruh keluarga tercinta yang tiada hentinya memberikan doa serta dukungan selama penyusunan Tugas Akhir ini.
11. Teman-teman seperjuangan “Accounting CUPANG” yang telah saling mendukung, saling membantu dan solid selama tiga tahun bersama-sama hingga penyusunan Tugas Akhir masing-masing.

12. Sahabat tersayang yang selalu bersedia mendengar segala keluh kesah, bersama baik suka maupun duka hingga berjuang bersama-sama, dan memberi dukungan sepenuhnya dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

13. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah banyak berkontribusi, memberikan doa serta dukungan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

Disadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini jauh dari kata sempurna sehingga masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan/kelemahan yang disebabkan karena keterbatasan kemampuan serta pengalaman. Maka dari itu, diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dan diharapkan Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi yang berkepentingan.



JURUSAN AKUNTANSI Badung, 22 Juli 2023
POLITEKNIK NEGERI BALI Penulis

**ANALISIS REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH GUNA MENILAI KINERJA KEUANGAN PADA
PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI**

ABSTRAK

A A Istri Dyah Candrika Widyadnyani

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2021-2022. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kuantitatif, dan data yang digunakan adalah data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2021-2022. Kinerja keuangan dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dapat dilihat dari rasio kemandirian, rasio efektivitas terhadap PAD, rasio efisiensi keuangan daerah, dan rasio keserasian belanja daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) Rasio kemandirian termasuk dalam kriteria rendah sekali dengan tingkat rasio sebesar 17,02% pada tahun 2021 dan 15,17% pada tahun 2022. 2) Rasio efektivitas terhadap PAD termasuk dalam kriteria efektif dengan tingkat rasio untuk tahun 2021-2022 masing-masing mencapai 136,75% dan 97,88%. 3) Rasio efisiensi keuangan daerah termasuk dalam kriteria tidak efisien yang ditunjukkan dengan tingkat rasio sebesar 96,39% pada tahun 2021 dan 112,16% pada tahun 2022. 4) Rasio Keserasian Belanja dikatakan kurang baik karena belanja operasi lebih tinggi daripada belanja modal.

Kata Kunci: *APBD, Kemandirian, Efektivitas PAD, Efisiensi, Keserasian Belanja*

ANALYSIS OF REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET REALIZATION TO ASSESS FINANCIAL PERFORMANCE IN BANGLI DISTRICT GOVERNMENT

ABSTRACT

A A Istri Dyah Candrika Widyadnyani

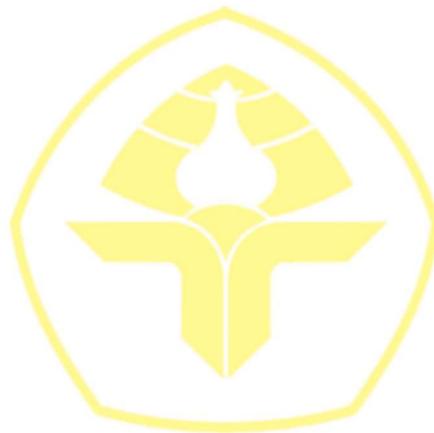
This research aims to assess the financial performance of the Bangli Regency Government in managing the Regional Budget for the years 2021-2022. The data analysis technique used in this study is quantitative descriptive, and the data used are secondary data from the Bangli Regency's Budget Realization Report for the years 2021-2022. The financial performance in managing the regional budget can be evaluated through the ratios of self-reliance, effectiveness towards Own Source Revenue (PAD), financial efficiency, and budget compatibility ratios. The research results indicate that: 1) The self-reliance ratio falls into the very low category with ratios of 17.02% in 2021 and 15.17% in 2022. 2) The effectiveness ratio towards PAD falls into the effective category, with ratios of 136,75% for 2021 and 97,88% for 2022. 3) The financial efficiency ratio is classified as inefficient, with ratios of 96.39% in 2021 and 112.16% in 2022. 4) The Budget Compatibility Ratio is considered less favorable as the operational expenditure is higher than the capital expenditure.

Keywords: *Regional Budget, Self-reliance, Effectiveness of Own Source Revenue (PAD), Efficiency, Budget Compatibility.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR RUMUS	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
2.1 Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Kerangka Pikir Penelitian.....	10
2.3 Kajian Teori.....	11
BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1 Lokasi dan Objek Penelitian.....	27
3.2 Jenis Data, Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data	27
3.3 Metode Pengolahan dan Teknik Analisis Data	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
4.1 Data dan Hasil Pengolahan Data	32
4.2 Hasil Analisis dan Pembahasan.....	38
4.3 Interpretasi Hasil Penelitian	41

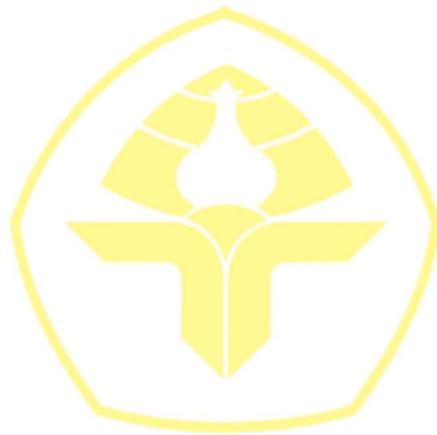
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	44
5.1 Simpulan.....	44
5.2 Saran.....	45
DAFTAR PUSTAKA	46
LAMPIRAN	48



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir Penelitian.....	10
--	----



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR TABEL

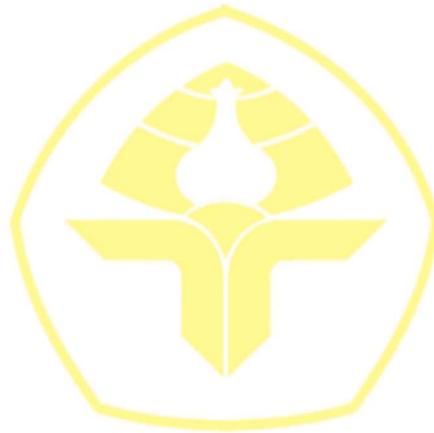
Tabel 1. 1 Anggaran beserta Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2021-2022.....	4
Tabel 1. 2 Anggaran beserta Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2021-2022.....	4
Tabel 2. 1 Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah.....	22
Tabel 2. 2 Kriteria Penilaian Efektivitas terhadap PAD.....	24
Tabel 2. 3 Kriteria Penilaian Efisiensi Keuangan Daerah	25
Tabel 2. 4 Kriteria Penilaian Keserasian Belanja Daerah	26
Tabel 4. 1 Data Pendapatan-LRA Tahun 2021-2022.....	32
Tabel 4. 2 Data Belanja Tahun 2021-2022	32
Tabel 4. 3 Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.....	33
Tabel 4. 4 Perhitungan Rasio Efektivitas terhadap PAD.....	34
Tabel 4. 5 Perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah.....	35
Tabel 4. 6 Perhitungan Rasio Belanja Operasi	36
Tabel 4. 7 Perhitungan Rasio Belanja Modal	37



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR RUMUS

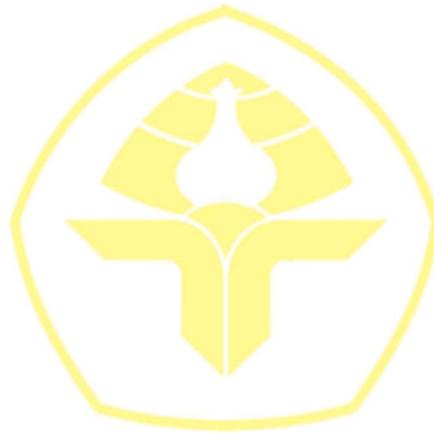
Rumus 1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.....	22
Rumus 2. Rasio Efektivitas terhadap PAD	23
Rumus 3. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah.....	24
Rumus 4. Rasio Belanja Operasi.....	25
Rumus 5. Rasio Belanja Modal.....	26



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bangli Tahun 2021.....	49
Lampiran 2. Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bangli Tahun 2022.....	53
Lampiran 3. Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	57
Lampiran 4. Perhitungan Rasio Efektivitas terhadap PAD.....	58
Lampiran 5. Perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah	59
Lampiran 6. Perhitungan Rasio Keserasian Belanja Daerah	60



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintahan adalah suatu organisasi yang memiliki kekuasaan untuk mengatur kepentingan Bangsa dan Negara. Lembaga pemerintah juga dianggap sebagai lembaga tertinggi yang diberikan wewenang untuk mengatur Bangsa dan Negara. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dengan cara mengelola potensi daerah yang dimilikinya seperti meningkatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan utama yang disusun oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, APBD didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, yang menggambarkan perkiraan pengeluaran guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu. APBD merupakan salah satu dokumen rencana kinerja aspek finansial, dimana anggaran yang akan digunakan pemerintah daerah sebagai dasar untuk melakukan pengembangan daerah. APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan keuangan daerah. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya dituangkan dalam APBD yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam

membiayai kegiatan tugas pembangunan. Pengukuran kinerja keuangan daerah bertujuan untuk menilai akuntabilitas maupun efektifitas pengelolaan anggaran sehubungan aktifitas pelayanan publik. Penilaian akuntabilitas tersebut bukan hanya semata berbicara mengenai bagaimana pemerintah daerah mampu menyerap serta menggunakan anggaran, namun terlebih pada bagaimana pengalokasian anggaran tersebut telah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai kaidah prinsip pengalokasian anggaran yang efektif, efisien serta ekonomis.

Menurut kamus akuntansi manajemen, Kinerja (*performance*) diartikan sebagai aktivitas terukur dari suatu entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan. Pengukuran kinerja diartikan sebagai suatu sistem keuangan atau non keuangan dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan atau hasil yang dicapai dari suatu aktivitas, suatu proses atau suatu unit organisasi. Sementara, kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditentukan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran.

Kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya dapat dilakukan dengan analisis rasio keuangan terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah. Halim & Kusufi (2013) menyatakan bahwa hasil analisis rasio keuangan dipergunakan sebagai tolok ukur dalam menilai: 1) Kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan

pemerintahan efisiensi dan efektivitas dalam merealisasikan pendapatan daerah, 2) Sejauh mana aktivitas Pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya. Kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah, 3) Pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak.

Pemerintah Kabupaten Bangli adalah salah satu daerah otonom di Provinsi Bali. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli dari tahun 2021 sampai dengan 2022 beserta realisasinya dapat dilihat pada tabel 1.1 dan tabel 1.2 berikut ini.

**Tabel 1. 1 Anggaran beserta Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bangli
Tahun 2021-2022**

Thn.	Pendapatan		Selisih	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rp	Persentase
2021	1.160.404.968.369,00	1.150.283.515.663,56	(10.121.452.705,44)	-0,87%
2022	1.143.205.070.988,00	1.105.440.499.468,50	(37.764.571.519,50)	-3,30%

Sumber: Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bangli

**Tabel 1. 2 Anggaran beserta Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bangli
Tahun 2021-2022**

Thn.	Belanja		Selisih	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rp	Persentase
2021	1.300.517.899.508,00	1.108.810.931.922,90	(191.706.967.585,10)	-17,29%
2022	1.321.729.701.480,00	1.239.853.052.692,60	(81.876.648.787,40)	-6,60%

Sumber: Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bangli

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 beserta realisasinya mengalami selisih. Dari Tabel 1.1 dan Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan dan juga realisasi belanjanya selalu lebih kecil dari anggaran yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah pada pemerintah Kabupaten Bangli tidak terserap sepenuhnya karena adanya permasalahan dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja. Dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pembukuan BKPAD Kabupaten Bangli, permasalahan berada pada pengelolaan anggaran belanja, dimana alokasi dan akumulasi dana yang terbatas yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bangli dalam membiayai program dan kegiatan diakibatkan masih rendahnya pendapatan asli daerah dan perimbangannya terhadap APBD, maka sebagian

sumber dana digunakan untuk membiayai pengeluaran atau belanja bersumber dari dana perimbangan, terpenting pada dana alokasi umum, adanya penyesuaian program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bangli. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bangli memiliki ketergantungan fiskal yang cukup tinggi terhadap pemerintah pusat, dan sebagian besar anggaran belanja daerah yang tidak terealisasi dengan maksimal.

Analisis rasio keuangan APBD sangat perlu dilakukan, dalam rangka melakukan perencanaan keuangan yang lebih baik dan mensejahterakan seluruh masyarakat Kabupaten Bangli dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui kecenderungan yang terjadi apakah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bangli sudah terealisasi dengan baik atau tidak dan menilai apakah Pemerintah Kabupaten Bangli telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien, serta efektif.

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bangli pada tahun anggaran 2021-2022?
2. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli pada tahun anggaran 2021-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bangli tahun 2021-2022.
2. Untuk mengetahui kinerja keuangan pelaksanaan APBD pada Pemerintah Kabupaten Bangli tahun 2021-2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Selain memiliki tujuan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan manfaat empiris yang berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan, serta wawasan bagi peneliti dan pihak lain mengenai analisis rasio keuangan. Penelitian ini juga diharapkan bisa dijadikan pedoman dan tambahan sumber pustaka yang berhubungan dengan bidang akuntansi.

1.4.2 Manfaat Empiris

1. Bagi Mahasiswa

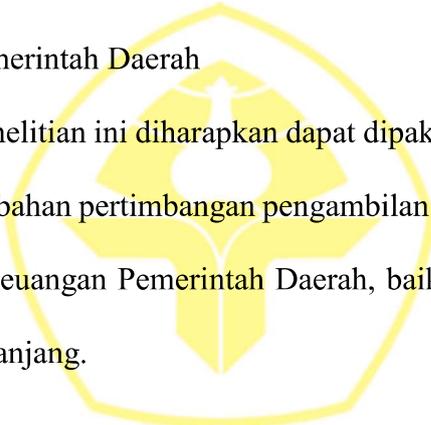
Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa tentang rasio keuangan khususnya mengenai pengukuran kinerja pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

2. Bagi Politeknik Negeri Bali

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa lain yang ingin mengadakan penelitian mengenai analisis laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

3. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai tolok ukur dan menjadi bahan pertimbangan pengambilan keputusan terkait dengan kinerja keuangan Pemerintah Daerah, baik jangka pendek maupun jangka panjang.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada Bab IV atas Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2021-2022, dapat disimpulkan bahwa;

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bangli Tahun 2021-2022 mengalami selisih setiap tahunnya. Dimana realisasi pendapatan dan realisasi belanjanya lebih kecil dari anggaran yang telah ditetapkan pada periode tersebut.
2. Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli pada tahun 2021-2022 kurang baik dan perlu ditingkatkan. Meskipun terdapat efektivitas yang baik dalam merealisasikan pendapatan daerah, namun ketergantungan terhadap sumber dana pemerintah pusat masih sangat tinggi, efisiensi pengelolaan anggaran belum optimal, dan alokasi dana untuk pembangunan daerah belum mencapai tingkat yang diharapkan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bangli perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah, meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran, serta memprioritaskan alokasi dana untuk pembangunan guna mencapai kinerja keuangan yang lebih baik lagi kedepannya.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan tersebut, saran yang dapat disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Bangli sebagai bahan masukan yaitu:

1. Pemerintah Kabupaten Bangli perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan tingkat kemandirian keuangan daerah. Salah satu cara adalah dengan mengurangi ketergantungan terhadap sumber dana ekstern, seperti pemerintah pusat atau provinsi. Fokus pada penggalan potensi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi prioritas. Hal ini dapat dicapai dengan lebih mengoptimalkan pajak dan retribusi daerah, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam kesadaran membayar pajak.
2. Dalam rangka meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran, Pemerintah Kabupaten Bangli perlu melakukan analisis yang lebih mendalam terhadap belanja daerah. Lebih mengupayakan penghematan yang dapat dilakukan harus menjadi perhatian utama.
3. Rasio keserasian belanja daerah yang menunjukkan prioritas belanja operasi yang lebih besar dari belanja modal perlu diperbaiki. Pemerintah Kabupaten Bangli perlu mengutamakan alokasi dana untuk pembangunan daerah agar pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta.
- Badan Litbang Depdagri RI dan FISIPOL–UGM. (1991). *Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Tingkat II Dalam Rangka Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggung Jawab*.
- Fitra, H. (2019). *Analisis Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah*. CV IRDH.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2013). *Akuntansi Keuangan Daerah* (4 ed.). Salemba Empat.
- Hardani, Juliana Sukmana, D., & Fardani, R. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif Seri Buku Ajar View project Riset Kolaborasi View project*. <https://www.researchgate.net/publication/340021548>
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (Ketiga). Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mahsun, M., Sulistiyowati, F., & Purwanugraha, H. A. (2013). *Akuntansi Sektor Publik* (Ketiga). BPFE - Yogyakarta.
- Nurkholis, & Khusaini, M. (2019). *Penganggaran Sektor Publik*. Universitas Brawija Press.
- Rahayu, S. A. (2018). *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*. Sinar Grafika.
- Sartika, N. (2019). Inovbiz Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti. Dalam *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis* (Vol. 7). www.ejournal.polbeng.ac.id/index.php/IBP
- Syukri, M., Pahmi, S., & Suandi. (2022). Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. *GEMILANG: Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, Vol.2, No. 1.
- Tyas, F. A. S., & Rani, U. (2022). *TRANSEKONOMIKA: Akuntansi, Bisnis dan Keuangan Volume 2 ISSUE 3 (2022)*. <https://transpublika.co.id/ojs/index.php/Transekonomika>
- Ula, N. N., & Bharata, W. R. (2022). *TRANSEKONOMIKA: Akuntansi, Bisnis dan Keuangan Volume 2 ISSUE 5 (2022)*. <https://transpublika.co.id/ojs/index.php/Transekonomika>
- Yuliyanto, W., Uswatun Khasanah, & Riza Umami. (2022). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Anggaran APBD Terhadap Realisasi Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Abc Periode 2018-2020. *Jurnal E-Bis*, 6(2), 456–468. <https://doi.org/10.37339/e-bis.v6i2.989>

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-

Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah pasal 66 ayat 3

Undang-Undang No. 17 tahun 2003 dan Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah nomor 105 tahun 2000

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI